

**MANAJEMEN PARKIR UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG**

Hilda Happy Ekaryn, Augustin Rina Herawati, Dyah Hariani

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The receipt of parking retributions, which are still not constant and rather low when compared to the Semarang city's potential, demonstrates that parking regulation in the city of Semarang has not yet been implemented successfully. In terms of parking management, there are still inherent challenges including unauthorized parking and unreasonable fees. Thus, effective parking management will create a large number of parking retribution receipts, which will subsequently be used to increase Semarang City's local own-source revenue (PAD). The purpose of this research is to analyze the Semarang City Transportation Department's parking management in order to increase local own-source revenue (PAD), as well as to identify the challenges that Semarang City has in implementing parking management. In order to solve the problems and research objectives, the researcher applied George R. Terry's (2006: 342) theory of managerial functions such as planning, organizing, moving, and supervising. This research used a qualitative technique with a descriptive approach in order to provide more thorough information; furthermore, the data in this research were acquired from primary and secondary sources via interviews, observations, and literature documents. According to the findings of this research, parking management has completed all stages. The planning step is performed properly, with the transportation department planning the goals or targets to be achieved as well as the programs. Moreover, the organizing step was well-executed, with the department arranging the structure by developing a special division that managed the parking sector and assigned roles to each employee. The moving stage is already operational, however, it is not optimal. Movements in instructional programs to socialize the regulations applied, and information activities on parking spaces that can be used as parking spots, are still not ideal. Meanwhile, there has been an increase in the number of parking retribution operations, the creation of contractual arrangements or agreements, the contribution to supporting facilities, and the compiling and presenting reports. The final stage is the supervising stage. At this stage, supervision is still not operating at optimum performance. The Department of Transportation conducts two forms of supervision: direct and indirect supervision. Direct supervision is provided through monitoring directly in the field. Yet, indirect supervision is based only on income reports. However, in order to increase local own-source revenue (PAD), there are challenges in parking management in Semarang City, such as a shortage of workers at the Semarang City Transportation Department, a lack of public awareness, and many violations identified.

Keywords: Parking Management, Parking Retribution, Local Own-source Revenue

PENDAHULUAN

Saat ini Indonesia menganut suatu sistem dimana dalam pelaksanaan pemerintahannya dilimpahkan kepada daerah atau disebut dengan otonomi daerah. Diterapkannya sistem ini dikarenakan atas banyaknya pertimbangan – pertimbangan apalagi jika dilihat tidak sedikit kepentingan yang wajib dipenuhi oleh pemerintah pusat. Dengan terlaksanakannya otonomi daerah di seluruh Indonesia, bertujuan agar daerah mampu untuk merencanakan serta menjalankan segala kegiatan yang dinilai dapat menunjang pembangunan daerah tersebut secara mandiri. Selaras dengan hal tersebut saat mulai diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, menjadikan jumlah hal yang harus diurus oleh Pemerintah Daerah terbilang cukup banyak. UU tersebut menjadi pedoman pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Dimana didalamnya pun mewajibkan hadirnya pembaruan yang lebih baik lagi dalam hal pelayanan ke masyarakat dan juga diharuskan untuk selalu berinovasi dalam memperoleh pemasukan dalam penyelenggaraan pemerintahannya.

Salah satu sumber pemasukan yang mampu diperoleh daerah guna membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahannya bisa didapatkan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 merupakan sumber keuangan daerah yang berasal dari daerah itu juga. Dimana pemasukan dihasilkan dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang telah dilakukan pemisahan dan lainnya sesuai PAD yang sah. Dalam penelitian ini akan lebih mengkaji ke salah satu sumbernya yaitu retribusi daerah. Retribusi daerah ialah iuran yang dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah, dan pembayaran tersebut merupakan remunerasi atau kompensasi atas segala sesuatu yang diberikan pemerintah kepada rakyat (Suparmoko, 1988). Retribusi daerah pun menjadi landasan dari pemasukan daerah, yang berfungsi sebagai pendukung dalam peningkatan PAD. Adapun salah satu komponen untuk mendapatkan sumber pendapatan yang sah maka dapat diperoleh dari retribusi parkir.

Seperti banyaknya kota lainnya, Kota Semarang pun salah satu sumber pemasukannya diperoleh dari retribusi yang mana perannya begitu krusial dalam upaya peningkatan pemasukan daerah guna mengembangkan dan menyelenggarakan

pemerintahan. Salah satu sumber pemasukan retribusi ialah retribusi parkir di kota Semarang. Tidak sedikitnya jumlah penduduk serta kendaraan yang berada di kota Semarang setiap harinya, memang seharusnya dibarengi dengan jumlah titik parkir yang tersedia. Diketahui hingga akhir tahun 2019, jumlah kendaraan motor yang beroda 2 dan 4 yang ada di Kota Semarang berjumlah kurang lebih 1.616.505 yang meliputi dari 1.370. 402 unit kendaraan beroda 2 (85%) dan 246.103 unit kendaraan beroda 4 (15%). Selain itu berdasarkan data dari Dinas Perhubungan yang memiliki tanggung jawab pada pelaksanaan terhadap pemasukan retribusi parkir, saat ini di Kota Semarang terdapat 790 titik parkir umum. Melihat data tersebut sudah seharusnya pemasukan yang diperoleh dari retribusi parkir mampu menghasilkan lebih banyak dan dapat meningkat terus jika dibandingkan dengan pemasukan yang sudah tercapai hingga saat ini namun nyatanya realisasi pendapatan dari retribusi parkir dapat dikategorikan sangat jauh dari target yang ingin dicapai. Selain itu juga terdapat permasalahan lainnya yaitu banyaknya pelanggaran yang terjadi, walaupun telah diberikan rambu larangan lalu lintas dan terjun langsung ke lapangan yang kerap diadakan oleh Dinas Perhubungan Kota

Semarang, masih ditemukan pelanggar yang memarkirkan kendaraannya pada kawasan larangan parkir.

Lalu juga ditemukan permasalahan lainnya yakni tarif parkir yang tidak sesuai. Banyak sekali dijumpai juru parkir yang memungut parkir seenaknya sendiri tidak sesuai aturan. Yang mana dalam aturan yang telah diatur dalam Peraturan Walikota No. 9 Tahun 2018 tentang Tarif Parkir Tepi Jalan Umum yakni untuk kendaraan beroda 2 dan 3 sebesar Rp. 2000,00 kendaraan beroda 4 Rp. 3.000,00 kendaraan beroda 6 dan seterusnya Rp. 15.000,00 namun nyatanya di lapangan tarif ini dinaikkan misalnya untuk kendaraan beroda 2 sebesar Rp.5.000 dan selebihnya. Selain itu permasalahan zonasi parkir yang belum diinformasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui mana yang merupakan parkir resmi dan mana yang tidak resmi. Adapun berikut ini beberapa data parkir resmi di 3 jalan atau kawasan utama ramai pertokoan, lalu lintas dan lainnya di Kota Semarang yang tercatat dalam data di Dinas Perhubungan Kota Semarang.

Di samping itu, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dapat peneliti simpulkan mengenai manajemen parkir untuk meningkatkan PAD yang dilakukan di kota lainnya yang dapat dijadikan referensi.

Adapun penelitian yang terdahulu yang pertama yaitu yang dilakukan oleh Dicky Yuduf, dkk. (2019) dalam jurnal yang berjudul Strategi Pengelolaan dan Pemungutan Retribusi Parkir di Kota Palu. Dilakukannya penelitian dimaksudkan untuk menjawab serta menganalisis strategi yang telah dijalankan dalam upaya pengelolaan dan pemungutan retribusi parkir yang mana bertujuan untuk memperbaiki pengelolaan retribusi pelayanan parkir dalam upaya meningkatkan PAD Kota Palu. Metodologi penelitian kualitatif tipe deskriptif dipakai pada penelitian ini dengan pendalaman pada wawancara yang dikaitkan dengan segala aspek kehidupan dan seberapa baik pengelolaan retribusi parkir yang dilakukan. Penelitian ini memfokuskan pada strategi serta upaya yang diupayakan dalam upaya peningkatan PAD. Hasil penelitian menunjukkan situasi pengelolaan parkir di Kota Palu yang pada nyatanya di lapangan belum rapi serta belum maksimal dalam cara pengelolaan parkir, dibuktikan dengan berbagai masalah yang ditemukan seperti badan jalan yang digunakan sehingga berkurang dan tidak sesuai fungsinya, sedikitnya ruang parkir yang tersedia mengakibatkan kemacetan di ruas jalan yang dijadikan lahan parkir, masih adanya pelanggaran penarikan retribusi yang tidak

seharusnya berbeda dari tarif yang telah ditentukan dan lainnya. Melihat hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan Perda yang dijalankan belum bekerja secara maksimal yang mengakibatkan dibutuhkan pembicaraan ulang terhadap pengguna Perda melalui kegiatan pengecekan langsung ke masyarakat sesuai kebutuhan.

Lalu penelitian terdahulu kedua yaitu yang dilakukan oleh Septian Wulandari (2015) dalam jurnal yang berjudul Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Oleh UPTD Pengelola Parkir Pada Dinas Perhubungan Di Kota Samarinda. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Samarinda. Penelitian ini dimaksudkan agar dapat memberikan penjelasan mengenai pengelolaan parkir tepi jalan yang dilaksanakan oleh Bidang Pengelola Parkir Dinas Perhubungan Kota Samarinda dan faktor penghambat yang dialami dalam pengelolaan parkir tepi jalan oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda. Metodologi penelitian kualitatif dipakai pada penelitian ini dengan pendalaman pada studi kepustakaan, pengamatan langsung, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini memfokuskan pada pengelolaan parkir tepi jalan oleh UPTD pengelola parkir Dinas Perhubungan Kota Samarinda dan hambatan yang harus dialami. Hasil penelitian menunjukkan telah dijalanannya prinsip-

prinsip manajemen pengelolaan parkir dengan baik sesuai dengan aturan perundang-undangan, dari tahap awal yaitu perencanaan dengan menetapkan lokasi parkir yang dinilai memiliki potensi, lalu pengorganisasian dengan melakukan perekrutan dan membagi kerja petugas parkir, lalu pelaksanaan dengan menyediakan sarana dan prasarana serta pengawasan dan evaluasi kerja. Kenyataannya, realisasi pemasukan retribusi parkir masih memerlukan perbaikan sebab tidak memenuhi target. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa masih perlu adanya peningkatan, beberapa solusi misalnya menjalin kemitraan dengan pihak ketiga/ swasta, UPTD senantiasa melaksanakan sosialisasi ke masyarakat dengan cara pemasangan spanduk dan menugaskan para juru parkir untuk memberitahu masyarakat agar memarkirkan kendaraannya di tempat parkir resmi yang sudah disiapkan.

Berdasarkan pemaparan diatas maka peneliti tertarik untuk memahami permasalahan ini lebih dalam tentang bagaimana manajemen parkir yang dijalankan Dinas Perhubungan Kota Semarang untuk meningkatkan PAD di Kota Semarang dan hambatan yang harus dialami dalam pelaksanaan manajemen parkir di Dinas Perhubungan. Dimana dalam

penelitian akan berbeda dari 2 penelitian sebelumnya karena didalam penelitian ini akan menggunakan teori dari George R. Terry (2006) yang mana dalam manajemen harus memenuhi 4 fungsi manajemen. Yang mana 4 fungsi ini akan menjadi tolak ukur apakah manajemennya berhasil atau tidak. Selain itu melalui teori ini juga dapat dilihat fungsi mana yang belum baik dan yang sudah baik nantinya akan diketahui hambatan dalam pelaksanaannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan secara deskriptif. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif ini diharapkan informasi yang didapatkan lebih rinci dan bersifat alamiah karena didalamnya akan menjelaskan gambaran atas suatu fenomena. Pada penelitian ini akan menjelaskan mengenai manajemen parkir untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di Dinas Perhubungan Kota Semarang. Penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Semarang lebih tepatnya di Dinas Perhubungan Kota Semarang. Subyek penelitian ditentukan dengan menggunakan purposive sampling. Informan yang dipilih yang berkaitan dan dirasa paham betul mengenai topik yang diteliti adapun dalam

penelitian ini yaitu pegawai Dinas Perhubungan Kota Semarang, petugas juru parkir, dan masyarakat pengguna jasa parkir.

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini yaitu jenis data kualitatif dan sumber data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya sedangkan data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara seperti buku, jurnal, laporan, penelitian terdahulu, artikel, web resmi yang berkaitan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan studi kepustakaan atau dokumentasi untuk memperoleh data. Dalam penelitian ini dalam menganalisa data yang digunakan melewati beberapa tahapan. Tahapan pertama dalam pengolahan data kualitatif yakni reduksi data, kedua yakni penyajian data atau display dan ketiga yakni data yang sudah disajikan akan diverifikasi atau disimpulkan dengan mencari bukti-bukti pendukung. Lalu untuk menguji kualitas data akan menggunakan triangulasi sumber data. Triangulasi menggunakan beragam jenis sumber data untuk mendapatkan atau memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian. Maka sumber yang didapatkan akan diuji dengan membandingkannya pada

data sejenis yang didapatkan dari sumber yang berbeda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Retribusi Parkir Di Kota Semarang

Pada pelaksanaan pungutan terhadap retribusi parkir sebagai sumber retribusi daerah terhadap PAD Kota Semarang nyatanya dihadapkan dengan persoalan yang mana menghambat manajemen parkir. Dimana dapat dibuktikan dengan realisasi yang tidak memenuhi target. Berikut ini penyajian data mengenai target beserta realisasi pendapatan retribusi parkir dari tahun 2013 – 2021.

Tabel. 1.

Target dan Realisasi PAD dari Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Semarang

Tahun	Target (RP)	Realisasi (RP)	Persentase (%)
2013	5.853.120.000	2.601.911.700	44,45 %
2014	3.700.000.000	2.783.789.500	75,23 %
2015	3.700.000.000	2.804.290.000	75,79 %
2016	3.850.000.000	3.012.751.000	78,25 %
2017	4.235.000.000	2.529.446.000	59,73 %
2018	15.000.000.000	2.441.057.000	16,27 %
2019	4.300.000.000	2.300.000.000	53,00 %
2020	2.300.000.000	2.369.000.000	103,00 %
2021	1.700.000.000	1.887.000.000	111,00 %

Sumber : Laporan Tahunan Dinas Perhubungan Kota Semarang

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan persentase pencapaian realisasi dari target yang telah ditentukan setiap tahunnya di Kota Semarang tidak stabil. Contohnya dari tahun 2013 sampai 2016 persentase pencapaian mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, yang awalnya persentase pencapaiannya hanya 44,45 % di tahun 2013 menjadi 75,23 % di tahun 2014 dan menjadi 75,79 % di tahun 2015 hingga terakhir mengalami peningkatan menjadi sebesar 78,25 % di tahun 2016. Ini menunjukkan adanya perubahan yang lebih baik dalam manajemen yang dilakukan sehingga pencapaian retribusi semakin meningkat.

Namun sayangnya kenaikan realisasi dari target yang telah ditentukan berhenti di tahun 2016 karena dari 2016 sampai 2018 mengalami penurunan yang sangat signifikan bahkan di tahun 2018 persentase pencapaiannya hanya sebesar 16,27 %. Jika dilihat dari data ini bisa karena banyak hal yaitu pertama karena target yang terus naik setiap tahunnya tetapi realisasi mengalami penurunan. Kedua karena target yang tidak realistis, seharusnya saat melihat bahwa realisasi tahun sebelumnya mengalami penurunan maka target tahun selanjutnya harus disesuaikan seperti kejadian di tahun 2014 dan 2015 bukannya naik sangat tinggi seperti di tahun 2018 yang targetnya

mencapai Rp. 15.000.000.000. Sebab dalam menentukan target tidak boleh sembarang. Ketiga manajemen yang kurang maksimal karena adanya hambatan maupun kendala sehingga mengalami penurunan.

Setelah mengalami penurunan yang cukup signifikan, beruntungnya di tahun berikutnya mengalami kenaikan bahkan 2 tahun melebihi target yang ditetapkan. Namun keberhasilan ini dikarenakan diturunkannya target yang harus dicapai menjadi lebih realistis karena melihat kegagalan pencapaian di tahun 2018. Selain itu penurunan target juga di karena masalah Covid – 19 di Indonesia sehingga harus diberlakukannya PPKM yang pastinya mempengaruhi pemasukan retribusi parkir di Kota Semarang. Ini membuktikan sebenarnya belum ada perubahan manajemen menjadi lebih baik lagi karena realisasi yang didapatkan sebenarnya masih rendah dari potensi besarnya retribusi yang sebenarnya bisa di dapatkan oleh Kota Semarang.

Adapun setelah melihat data tabel tersebut maka akan disandingkan dengan data realisasi retribusi daerah dan realisasi PAD untuk melihat kontribusi yang disumbang oleh realisasi retribusi parkir di Kota Semarang. Berikut ini penyajian data

kontribusi retribusi parkir terhadap realisasi retribusi daerah dan PAD tahun 2016 – 2020

Tabel. 2.

Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Total Retribusi Daerah Kota Semarang Tahun 2016 – 2020

Tahun	Realisasi Retribusi Parkir	Realisasi Retribusi Daerah	Persentase (%)
2016	3.012.751.000	123.215.026.523	2,45%
2017	2.529.446.000	85.744.858.357	2,95 %
2018	2.441.057.000	107.791.109.630	2,27 %
2019	2.300.000.000	113.680.849.539	2,03 %
2020	2.369.000.000	88.759.174.010	2,67 %

Sumber : Laporan Tahunan Badan Pusat Statistik Kota Semarang

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa kontribusi retribusi parkir terhadap retribusi daerah dikatakan masih kecil dibandingkan potensi yang seharusnya bisa didapatkan, selain itu kontribusinya juga masih belum stabil. Pada tahun 2016 retribusi parkir terhadap retribusi daerah sebesar Rp.3.012.751.000 atau (2,45 %.) dari total retribusi daerah Rp.123.215.026.523 di tahun berikutnya tahun 2017 terjadi peningkatan kontribusinya dimana retribusi parkir yang didapatkan sebesar Rp. 2.529.446.000 atau (2,95 %) dari total retribusi daerah Rp. 85.744.858.357 namun jika dilihat dari data baik retribusi parkir maupun retribusi daerah

sama - sama turun walaupun pencapaiannya naik. Lalu di tahun 2018 dan 2019 menurun kontribusi retribusi parkirnya terhadap retribusi daerah, dimana untuk tahun 2018 retribusi parkirnya sebesar Rp. 2.441.057.000 atau (2,27 %) dari total retribusi daerah Rp.107.791.109.630 sedangkan di tahun 2019 retribusi parkir yang didapatkan sebesar Rp.2.300.000.000 atau (2,03 %) dari retribusi daerah sebesar Rp. 113.680.849.539 namun jika dilihat dari data retribusi parkir semakin menurun tiap tahunnya, sedangkan retribusi daerahnya sejak menurun di tahun 2017 sekarang mengalami kenaikan sedikit demi sedikit di tahun 2018 dan 2019. Ini membuktikan manajemen retribusi parkir tidak membaik perlu dibenahi agar pemasukan retribusi parkir meningkat. Selanjutnya di tahun 2020 kontribusi retribusi parkir terhadap retribusi daerah mengalami kenaikan lagi dimana retribusi parkir besarnya Rp.2.369.000.000 atau (2,67 %) dari total retribusi daerah Rp. 88.759.174.010 ini berbeda dari tahun sebelumnya retribusi parkir mengalami kenaikan, justru retribusi daerah mengalami penurunan.

Tabel. 3.

**Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap
Total Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Kota Semarang Tahun 2016 – 2020**

Tahun	Realisasi Retribusi Parkir	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Persentase (%)
2016	3.012.751.000	1.491.645.900.065	0,21 %
2017	2.529.446.000	1.791.886.378.674	0,15 %
2018	2.441.057.000	1.821.274.103.250	0,14 %
2019	2.300.000.000	2.066.333.418.588	0,12 %
2020	2.369.000.000	1.947.490.659.665	0,13 %

Sumber : Laporan Tahunan Badan Pusat Statistik Kota Semarang

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa kontribusi retribusi parkir terhadap PAD setiap tahunnya mengalami penurunan yang artinya retribusi parkir belum sanggup untuk membantu PAD lebih meningkat lagi. Bisa dibilang kontribusinya pun masih sangat rendah sekali. Pada tahun 2016 retribusi parkir terhadap PAD sebesar Rp. 3.012.751.000 atau (0,21 %) dari total PAD sebesar Rp. 1.491.645.900.065 bahkan sampai tahun 2019 retribusi parkir terhadap PAD sebesar Rp. 2.300.000.000 atau (0,12 %) dari total Rp. 2.066.333.418.588 namun di tahun 2020 mengalami peningkatan walaupun sedikit sekali hanya 0,01 % dimana retribusi parkir sebesar Rp. 2.369.000.000 atau (0,13 %) dari

total Rp. 1.947.490.659.665 Jika dilihat penurunan kontribusi ini dikarenakan retribusi parkir di tahun 2016 – 2019 mengalami penurunan sedangkan PAD di tahun 2016 – 2019 mengalami peningkatan. Sedangkan mengalami peningkatan kontribusi saat retribusi parkir naik tetapi PAD menurun.

Dilihat dari 2 tabel kontribusi diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa untuk kontribusi retribusi parkir terhadap retribusi daerah sudah mulai meningkat 3 tahun belakangan walaupun masih sangat kecil dibandingkan potensi yang ada di Kota Semarang. Apalagi jika dilihat pada saat persentase kontribusi naik di waktu itulah retribusi daerah yang didapatkan rendah. Sedangkan untuk kontribusi retribusi parkir terhadap PAD mengalami penurunan terus menerus dan besaran kontribusinya pun sangat kecil sekali. Maka melihat itu manajemen parkir di Kota Semarang harus diperbaiki sehingga menghasilkan capaian yang maksimal sesuai potensi yang ada di Kota Semarang. Hal ini disebabkan dengan terlaksanakannya manajemen yang baik dan sesuai dapat memperbaiki, meningkatkan dan mengembangkan organisasi yang melakukan manajemen baik itu pemerintahan, swasta maupun lainnya. Berjalannya manajemen memberikan bukti bahwa organisasi telah melengkapi segala persyaratan yang ada dan

mempunyai perangkat kerja yang mampu untuk menjamin kualitas, kepercayaan dan kewenangan sebuah institusi dalam menetapkan suatu aturan, menghasilkan putusan kegiatan dan keputusan yang menggambarkan pemikiran dan hal yang dibutuhkan masyarakat. Utamanya, melalui manajemen, pemerintahan akan mendapatkan keuntungan yakni peningkatan kepercayaan masyarakat, meningkatkan keikutsertaan masyarakat, dan lainnya.

Program Manajemen Parkir Yang Dilaksanakan Dinas Perhubungan Kota Semarang

Manajemen merupakan suatu proses yang penting untuk dilakukan bila ingin mewujudkan tujuan yang ingin diraih. Adapun menurut Nugroho (2003) manajemen merupakan proses mengatur dan menangani suatu hal agar dapat mencapai tujuannya. Maka dari itu diperlukan manajemen agar tujuan dapat tercapai, selain itu manajemen yang dilakukan pun tidak boleh asal jalan saja, manajemen harus dilakukan secara baik dan matang agar tujuan dapat dicapai secara maksimal tanpa hambatan. Melihat hal ini Dinas Perhubungan Kota Semarang berusaha untuk melaksanakan manajemen yang baik dengan membuat beberapa program manajemen agar

kegiatannya tertata sehingga dalam pelaksanaannya bisa fokus menjalankan program secara baik. Adapun program kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang antara lain:

1. Kegiatan pembinaan bagi juru parkir
Sebelum menjadi juru parkir resmi, maka calon juru parkir diharuskan untuk melakukan pendaftaran diri terlebih dahulu ke Dinas Perhubungan. Saat mendaftarkan diri itulah dilakukan pembinaan awal kepada para calon juru parkir selain mengisi persyaratan untuk menjadi petugas juru parkir resmi. Tidak berhenti sampai disana pembinaan lainnya juga sering dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang saat turun langsung ke lapangan untuk mengadakan pengawasan dan tak jarang diadakan seminar yang mengundang beberapa juru parkir beserta narasumber yang memang ahli di topik pembinaan kala itu.
2. Kegiatan intensifikasi retribusi parkir
Proses pelaksanaan intensifikasi retribusi parkir dibagi menjadi 3 tahapan. Adapun tiga tahapan intensifikasi retribusi yaitu sebagai berikut :

- a. Prosedur menjadi juru parkir resmi, persyaratan yang harus dipenuhi yaitu melengkapi dan mengumpulkan surat permohonan, fotocopyan identitas diri seperti KK, 2 lembar Pas foto 3 x 4, surat kesanggupan setor, surat pernyataan bersedia menaati kewajibannya sebagai juru parkir
 - b. Penetapan titik lokasi parkir diputuskan dengan melihat dan mempertimbangkan rencana umum tata ruang kota, kenyamanan, kelancaran dan keselamatan lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan, kelestarian lingkungan dan kemudahan untuk pihak yang menggunakan jasa parkir.
 - c. Tata cara pemungutan hingga dengan disetorkan kepada kas negara melalui Bank Jateng. Adapun pemungutan yang dihasilkan dengan cara setoran langsung ke bank. Penyetoran juga dapat dilakukan sesuai kesepakatan dengan sistem setoran harian, mingguan maupun bulanan.
3. Kegiatan pemberian atribut resmi kepada juru parkir
- Memberikan atribut resmi lainnya yang dibutuhkan oleh para juru parkir sebagai upaya untuk melindungi, mengawasi, mengenali serta membedakan juru parkir resmi atau tidak. Atribut resmi yang diberikan

yakni rompi dan kartu tanda anggota (KTA) yang digunakan untuk membedakan dan identitas resmi juru parkir yang di bina oleh Dinas Perhubungan.

4. Kegiatan Pengawasan Parkir

Dinas Perhubungan dalam melaksanakan pengawasan terhadap area parkir dan petugas parkir yang berada dibawah tanggung jawabnya. Pengawasan dilakukan dengan cara mengecek langsung ke lokasi parkir yang ada. Apabila ditemukan pelanggaran maka Dinas Perhubungan akan memberikan sanksi. Dimana paling ringan yaitu peringatan dan paling berat yaitu pencabutan surat izin.

Fungsi Manajemen Pada Manajemen Parkir Yang Dilaksanakan Di Dinas Perhubungan Kota Semarang

Manajemen parkir di Kota Semarang oleh Dinas Perhubungan dilaksanakan untuk dapat membantu peningkatan PAD khususnya dalam sektor retribusi. Didalam penelitian menggunakan teori dari George R. Terry (2006) yang mana menjelaskan fungsi manajemen terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Adapun hasil penelitian

mengenai manajemen parkir yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Perencanaan

Perencanaan sebagaimana yang dikemukakan oleh George R. Terry (2006) merupakan suatu proses penentuan tujuan atau target yang akan dicapai serta memutuskan cara yang akan ditempuh dalam proses mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Maka berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam melaksanakan manajemen parkir guna peningkatan PAD pihak Dinas Perhubungan selaku penanggung jawab telah menjalankan tahapan perencanaan dan pelaksanaannya pun berjalan baik hal ini dibuktikan dengan perencanaan pertama yang dilakukan pihak Dinas Perhubungan Kota Semarang yaitu menentukan target-target yang harus dicapai. Dinas Perhubungan Kota Semarang dalam menentukan target penerimaan jasa retribusi parkir dengan cara mengumpulkan informasi yang nantinya dapat dijadikan perkiraan atau ramalan. Adapun informasi yang dikumpulkan seperti jumlah titik parkir yang terbaru, arah perkembangan Kota Semarang, jumlah penduduk, jumlah kendaraan khususnya beberapa tahun ke belakang, realisasi tahun sebelumnya,

potensi parkir, dan kemungkinan – kemungkinan yang tidak terduga. Namun perencanaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dalam menentukan target yang ingin dicapai juga pernah mengalami kegagalan. Seperti pada tahun 2018 contohnya dimana target ditentukan tanpa pertimbangan yang jelas. Tetapi beruntungnya untuk tahun berikutnya 2019 – 2021 perencanaan penentuan target kembali seperti sedia kala, ditentukan dengan pertimbangan yang jelas sehingga kesalahan di tahun 2018 tidak terulang kembali.

Bukti selanjutnya yaitu perencanaan kedua yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan yakni menetapkan program yang akan dijalankan selama 1 tahun berikutnya agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Dimana dalam menentukan kegiatan pun Dinas Perhubungan juga mengumpulkan informasi kemudian dianalisis dan melihat juga target yang ingin dicapai sehingga dapat menentukan program – program apa yang sesuai dengan kondisi yang akan dihadapi. Walaupun dalam menetapkan program kebanyakan masih sama seperti tahun lalu karena kondisinya yang belum begitu berubah menurut Dinas Perhubungan.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian sebagaimana dikemukakan oleh George R. Terry (2006) merupakan suatu proses untuk merencanakan struktur, mengelola serta mengatur tugas setiap pekerja agar tujuan dapat tercapai secara efisien. Maka berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dalam melaksanakan manajemen parkir guna peningkatan PAD di Dinas Perhubungan Kota Semarang telah menjalankan tahap pengorganisasian dan pelaksanaannya berjalan dengan baik. Ini dibuktikan dengan pengorganisasian pertama yang dilakukan pihak Dinas Perhubungan Kota Semarang yaitu membentuk bidang khusus yang menangani parkir di Kota Semarang. Dinas Perhubungan Kota Semarang dalam menjalankan pengorganisasian ini membagi kelompok kerja dan wewenang tertentu serta tanggung jawab yang akhirnya membuat suatu kesatuan usaha dalam mewujudkan tujuan. Dimana kelompok kerja dan wewenang tertentu disini yaitu bidang parkir. Adanya bidang khusus ini masalah parkir dapat diperhatikan secara lebih lagi, karena akan serius fokus dengan masalah parkir di Kota Semarang.

Bukti selanjutnya yaitu pengorganisasian kedua yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan yakni dengan dibaginya masing – masing seksi dimana setiap seksi menjalankan tugasnya namun tetap satu kesatuan. Dimana setiap seksi tahu tugasnya dan berusaha menjalankan tugasnya agar tujuan dapat tercapai. Selain itu walaupun memiliki tugasnya masing – masing setiap seksi atau bagian di Bidang Parkir tetap saling membantu satu sama lain.

3. Pergerakan

Pergerakan Sebagaimana dikemukakan oleh George R. Terry (2006) merupakan hal yang krusial karena pergerakan merupakan serangkaian kegiatan yang harus dijalankan oleh perusahaan atau organisasi. Maka berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dalam melaksanakan manajemen parkir guna peningkatan PAD di Dinas Perhubungan Kota Semarang telah menjalankan tahap pergerakan namun dalam pelaksanaannya masih belum baik terdapat beberapa kegiatan yang tidak berjalan maksimal bahkan belum dijalankan sama sekali. Untuk kegiatan yang belum berjalan dengan baik yaitu pertama kegiatan pembinaan mensosialisasikan aturan yang dipakai didalam manajemen parkir

ke juru parkir dan masyarakat. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan untuk meminimalisir kemungkinan kesalahan yang terjadi sehingga tujuan dapat tercapai. Adapun aturan yang dipakai yaitu ada dua yaitu pertama Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2004 tentang Parkir Tepi Jalan Umum dan Peraturan Walikota No. 9 Tahun 2018 tentang Tarif Parkir Tepi Jalan Umum. Untuk sosialisasi ke juru parkir telah berjalan dan dilaksanakan dengan baik dibuktikan dengan para juru parkir yang mengetahui mengenai aturan yang dipakai terlebih pembinaan tidak hanya dilakukan satu kali tak jarang juga dilaksanakan kegiatan seminar. Namun untuk sosialisasi ke masyarakat ternyata tidak berjalan. Hal ini dibuktikan dengan adanya perbedaan antara pernyataan yang di ungkap oleh pihak Dinas Perhubungan dengan masyarakat. Dimana pihak Dinas Perhubungan mengatakan sudah disosialisasikan sedangkan masyarakat mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui aturan tersebut dan setelah diteliti memang nyatanya untuk masyarakat belum disosialisasikan. Lalu kedua yaitu kegiatan pemberian informasi lahan parkir yang dapat dijadikan peluang kerja oleh masyarakat

yang ingin menjadi juru parkir. Untuk pergerakan ini nyatanya untuk saat ini bahkan belum berjalan sama sekali. Dimana kebanyakan para juru parkir datang sendiri ke Dinas Perhubungan dengan sudah memiliki lahan parkir yang belum ada penjaganya. Hal ini pun juga di akui oleh Dinas Perhubungan. Padahal dengan dilakukan penginformasian maka jumlah masyarakat yang ingin menjadi juru parkir namun tidak tahu mana lahan parkir yang belum ada penjaganya bisa meningkat. Dengan meningkatnya titik parkir maka retribusi parkir di Kota Semarang dapat meningkat sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan PAD.

Sedangkan untuk kegiatan yang telah berjalan dengan baik yaitu pertama kegiatan intensifikasi retribusi parkir. Untuk pergerakan ini ada 3 tahap dimana dibaginya ketiga tahap tersebut untuk mempermudah juru parkir. Selain itu tiap tahapnya pun pihak Dinas Perhubungan berusaha agar para juru parkir tidak mengalami kesulitan misalnya di tahap pertama yaitu pendaftaran para juru parkir hanya perlu memenuhi persyaratan yang mana persyaratannya pun standar seperti KTP, Foto dan lainnya. Lalu tahap kedua penetapan yang dilakukan oleh

Dinas Perhubungan dengan memeriksa langsung titik parkir. Serta tahap terakhir pemungutan yang mana bisa di setor langsung atau jemput bola.

Lalu kegiatan kedua yaitu kegiatan pembuatan kesepakatan atau perjanjian tertulis antara juru parkir dengan Dinas Perhubungan Kota Semarang. Dimana kesepakatan yang dibuat benar – benar melalui tahap pengecekan seperti jam operasional toko, besarnya lahan, ramainya kendaraan dan lainnya. Sehingga setoran yang ditetapkan didalam kesepakatan pun wajar tidak memberatkan. Selain itu didalam prosesnya pun setoran yang harus dikumpulkan sesuai dengan kesepakatan awal dan jika tidak bisa memenuhi Dinas Perhubungan memberikan kemudahan dengan cara para juru parkir bisa membuat surat pernyataan yang bertanda tangan.

Lalu kegiatan ketiga yaitu kegiatan menyediakan fasilitas pendukung juru parkir dalam pelaksanaan pekerjaannya. Dimana pihak Dinas Perhubungan memberikan rompi dan nametag untuk para juru parkir. Pemberian fasilitas ini bertujuan agar pihak Dinas Perhubungan dan masyarakat mengetahui dan mengenali manakah juru parkir resmi dan

manakah yang bukan. Sehingga jika memang ada pelanggaran yang terjadi misalnya juru parkir resmi yang menaikkan tarif bisa dicari dan dikenai sanksi. Dan jika ada juru parkir tidak resmi namun melaksanakan praktik parkir dapat segera diberi teguran untuk tidak melanggar atau untuk membuat surat izin terlebih dahulu sehingga uang yang didapatkan dari parkir tidak masuk ke kantong pribadi.

Lalu kegiatan terakhir yang belum maksimal yaitu kegiatan penyusunan dan penyajian laporan. Dimana laporan yang dihasilkan baik itu tiap bulan maupun laporan akhir tahun. Selain itu laporan yang dihasilkan juga dapat dilihat, diakses, dan diminta oleh masyarakat jika memang diperlukan. Selain itu pergerakan ini dibutuhkan untuk melihat hasil dari manajemen yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan.

4. Pengawasan

Pengawasan sebagaimana dikemukakan oleh George R. Terry (2006) merupakan segala kegiatan yang dilakukan oleh pihak manajer atau pemimpin dalam usahanya untuk menjamin hasil yang didapatkan sesuai dengan harapan. Maka berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dalam melaksanakan

manajemen parkir guna peningkatan PAD di Dinas Perhubungan Kota Semarang telah menjalankan tahap pengawasan namun dalam pelaksanaannya masih belum baik. Dibuktikan dengan dalam menjalankan pengawasan Dinas Perhubungan melakukan 2 jenis pengawasan yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Untuk pengawasan langsung dilakukan dengan terjun lapangan. Dimana Dinas Perhubungan sebagai penanggung jawab melakukan pengecekan langsung dengan turun ke lapangan dibantu satpol pp dan polrestabes. Hal yang dicek berupa tarif, kelengkapan atribut, dan lainnya. Apabila ditemukan pelanggaran seperti parkir ilegal, tarif yang tidak sesuai, atribut yang tidak lengkap dan pelanggaran lainnya maka pihak Dinas Perhubungan tidak segan memberikan teguran bahkan mencabut surat izin. Kekurangan dalam pengawasan langsung yaitu waktu pengawasan yang tidak pasti jadi tidak dicek terus menerus bisa saja saat tidak melakukan pengecekan banyak pelanggaran yang terjadi di lapangan. Sedangkan untuk pengawasan tidak langsung dilakukan dengan melihat laporan realisasi retribusi parkir setiap

bulan dan laporan dari masyarakat jika menemukan pelanggaran. Namun pengawasan ini memiliki kekurangan yaitu laporan pemasukan yang dibuat kurang menjelaskan manajemen parkirnya lebih rinci sehingga tidak dapat dilakukan penilaian apakah pelaksanaan retribusi parkir telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Selain itu kekurangan lainnya yaitu masih lemahnya kesadaran masyarakat. Walaupun sudah ada masyarakat yang melapor namun hal itu tidak sebanding dengan masyarakat yang memilih untuk tidak melapor.

HAMBATAN MANAJEMEN PARKIR

Dinas Perhubungan khususnya Bidang Parkir Kota Semarang dalam pelaksanaan manajemen parkir terhadap retribusi parkir guna peningkatan PAD Kota Semarang dihadapkan dengan hambatan. Adapun hambatan yang dihadapi antar lain :

1. Kurangnya jumlah Pegawai Dinas Perhubungan

Diketahui jumlah petugas yang mempunyai tugas dalam hal pengawasan sampai sekarang Dinas Perhubungan hanya mempunyai 3 sampai dengan 4 orang. Dimana untuk Bidang Parkir saja hanya berisikan 29 orang.

Ketidakseimbangan jumlah petugas yang bekerja di Dinas Perhubungan menjadikan pengawasan yang dilakukan di semua area parkir yang menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan berjalan dengan menghasilkan perkerjaan yang tidak maksimal. Selain itu dengan jumlah petugas yang sedikit tersebut juga tidak semua bisa turun ke lapangan untuk mengecek secara langsung disebabkan di kantor pun terdapat pekerjaan yang harus dikerjakan. Sedangkan untuk menambah petugas akan membutuhkan dana yang tidak sedikit.

2. Lemahnya kesadaran masyarakat

Penegakan aturan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan seharusnya didukung oleh masyarakat yang membantu dalam pelaksanaannya. Namun nyatanya kesadaran masyarakat untuk ikut serta melakukan pengecekan guna menemukan pelanggaran yang bisa saja terjadi masih sangat rendah.

Banyak masyarakat yang bersikap acuh terhadap pelanggaran yang terjadi sehingga pelanggaran tidak bisa diproses dengan sesegera mungkin oleh pegawai Dinas

Perhubungan. Selain itu kesadaran masyarakat yang rendah didapatkan dari hasil pertimbangan keuntungan dan kerugian yang akan diterima masyarakat jika melakukan pelaporan. Misalnya kasus kerusakan atau kehilangan barang dan penarikan tarif parkir yang tidak sesuai aturan, dan lainnya. Banyak pengguna jasa lebih memilih untuk membiarkan pelanggaran yang terjadi sebab merasa kerugian yang dialami kecil hanya uang sebesar Rp 1000,-. Yang akhirnya membuat mereka memilih untuk tidak melapor karena dianggap tidak terlalu merugikan.

3. Masih banyaknya pelanggaran yang terjadi dalam manajemen parkir

Pelanggaran yang terjadi dalam manajemen parkir masih banyak ditemukan dalam pelaksanaan manajemen parkir meskipun telah dilakukan berbagai cara untuk mengatasi atau meminimalisir hal ini. Pelanggaran yang terjadi misalnya seperti tarif yang tidak sesuai, lahan yang tidak seharusnya dipakai, juru parkir ilegal dan lainnya.

KESIMPULAN

Manajemen parkir untuk peningkatan PAD di Dinas Perhubungan Kota Semarang nyatanya masih belum maksimal ini dibuktikan dimana dalam pelaksanaan manajemen parkir ditemukan bahwa tidak semua bagian berjalan dengan baik. Untuk bagian perencanaan telah dilakukan dengan baik dimana pihak Dinas merencanakan tujuan atau target yang ingin diperoleh dan merencanakan program yang akan dijalankan selama satu tahun sebagai upaya agar target dapat tercapai. Selanjutnya bagian pengorganisasian pun telah dijalankan dengan baik dimana pihak dinas telah merencanakan struktur dengan membentuk bidang khusus yang menangani parkir dan membagi tugas ke setiap seksi. Selanjutnya bagian pergerakan, dalam menjalankan program manajemen parkir nyatanya masih terdapat beberapa kegiatan yang kurang berjalan bahkan belum sama sekali berjalan. Pergerakan yang masih kurang seperti pergerakan pada kegiatan pembinaan mensosialisasikan aturan yang dipakai, dan kegiatan penginformasian lahan parkir yang dapat dijadikan titik parkir. Sedangkan sisanya sudah berjalan dengan baik. Lalu bagian pengawasan, di tahap pengawasan ini juga belum berjalan maksimal. Terdapat 2 jenis pengawasan yang dijalankan oleh Dinas

Perhubungan yakni pengawasan tidak langsung dan langsung. Pengawasan langsung sebenarnya telah dijalankan dengan pengecekan ke lapangan namun waktunya masih tidak menentu. Sedangkan tidak langsung hanya mengandalkan laporan pemasukan saja yang mana tidak menjelaskan secara rinci prosesnya dan pelaporan masyarakat yang belum baik karena kurangnya kesadaran.

Selain itu ditemukan bahwa hambatan yang dialami dalam pelaksanaan yaitu kurangnya personil di Dinas Perhubungan Kota Semarang yang tidak sebanding dengan luas dan besarnya wilayah Kota Semarang. Selanjutnya lemahnya kesadaran masyarakat, banyak masyarakat yang kurang peduli dengan pelanggaran yang terjadi di sekitar mereka sehingga banyak kasus pelanggaran yang berlalu begitu saja tanpa penyelesaian. Lalu masih banyaknya pelanggaran yang ditemukan.

SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti laksanakan, terdapat beberapa saran yang dapat peneliti sarankan guna manajemen parkir yang akan dilaksanakan jauh lebih baik sehingga dapat meningkatkan PAD Kota Semarang yaitu antara lain:

1. Mempertahankan dan meningkatkan tahapan yang telah berjalan maksimal seperti tahapan perencanaan dan pengorganisasian. Untuk tahapan perencanaan harus memperhatikan banyak pertimbangan, jangan sampai mengulangi kesalahan penentuan target seperti pada tahun 2018 dan penentuan program juga setiap tahunnya diharapkan ada perubahan mengikuti perkembangan. Untuk pengorganisasian tetap dipertahankan dalam pembagian tugasnya yang sudah jelas. Namun diperlukan penambahan personil pada bidang parkir.
2. Memperbaiki dan meningkatkan tahapan yang belum berjalan dengan maksimal seperti tahap pergerakan dan pengawasan. Untuk pergerakan diharapkan dilakukan sosialisasi lebih gencar lagi terutama ke masyarakat mengenai aturan yang digunakan, tarif yang harus dibayarkan dan lainnya dan mungkin lewat kesempatan ini pula dapat menumbuhkan kesadaran di masyarakat untuk lebih peduli. Lalu juga dilakukan penginformasian sehingga masyarakat yang ingin menjadi juru parkir dapat mengetahui

mana titik yang bisa dijadikan lahan parkir yang nantinya akan menambah pendapatan. Di tahap pengawasan pun lebih ditingkatkan lagi, perlunya pengawasan yang lebih intensif. Lalu pengawasan tidak langsung harus meminta dukungan dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade, A. (2019). *Pengelolaan Parkir Sebagai Upaya Peningkatan PAD*. Universitas Islam Negeri Ar Rainny.
- Amelia, N. N. (2017). *Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Guna Meningkatkan Pendapatan Daerah (PAD) dalam Perspektif Ekonomi Islam*. UIN Raden Intan Lampung.
- Anikmah, I. (2016). *Pengelolaan Retribusi Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kota Tegal)*. IAIN Purwokerto.
- Ersita, M ., & Elim, I. (2016). Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBRA (Jurnal Riset, Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan*

- Akuntansi*).<https://doi.org/10.35794/emba.4.1.2016.11818>
- Nugroho. (2003). *Good Governance*. Mandar Maju.
- Putri, R. w. (2016). Analisis Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*.<http://dx.doi.org/10.17977/um002v8i12016p023>
- Rahman, A. (2018). Manajemen Retribusi Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM)*.
https://jom.unri.ac.id/index.php/JO_MFSIP?article/viewFile/18251/17629
- Suparmoko. (1988). *Ekonomi Pembangunan*. Liberty.
- Terry, G. R. (2006). *Prinsip – Prinsip Manajemen*. Bumi Aksara.
- Wulandari, S. (2015). *Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Oleh UPTD Pengelola Parkir Pada Dinas Perhubungan di Kota Semarang*. *Ejournal Administrasi Negara*, 3 No.1.
- Yusuf, D. (2019) *Strategi Pengelolaan dan Pemungutan Retribusi Parkir di Kota Palu*. *Jurnal Manajemen Transportasi dan Logistik*, 6 No.1.
<https://journal.itltrisakto.ac.id/index.php/jmtranslog/article/view/296>

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Artikel : Manajemen Parkir Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) di Dinas Perhubungan Kota Semarang

Nama Penyusun : Hilda Happy Ekaryn

NIM : 14020118120130

Program Studi : S1- Administrasi Publik

Semarang, 2 Juni 2022

Dosen Pembimbing I



Dr., Dra. Augustin Rina Herawati, M.Si
NIP. 196708151994012001

Dosen Pembimbing II



Dra. Dyah Hariani, MM
NIP. 195801271985032002